

Universitas Ngudi Waluyo

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Humaniora

Skripsi Februari 2026

Efka Arviani

111221008

Kajian Yuridis Rehabilitasi dalam Tindak Pidana Narkotika Mewujudkan Efek Jera

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba adalah isu hukum yang tidak hanya berkaitan dengan aspek kriminal, tetapi juga berhubungan dengan kesehatan dan masyarakat. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menekankan bahwa pengguna dan orang yang terpengaruh oleh narkoba harus mengikuti proses rehabilitasi baik medis maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi tentang rehabilitasi dalam konteks tindak pidana narkotika dan bagaimana pelaksanaannya di lembaga rehabilitasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis yuridis, yang didukung oleh penelitian pustaka dan wawancara dengan pihak rehabilitasi. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif, pengaturan rehabilitasi narkotika di Indonesia sudah diatur secara luas melalui UU Nomor 35 Tahun 2009, Peraturan Bersama Tujuh Lembaga Negara Tahun 2014, dan didukung oleh prinsip individualisasi pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Dari sudut pandang implementasi, rehabilitasi dilaksanakan melalui beberapa tahap, termasuk asesmen, rehabilitasi medis dan sosial, serta program aftercare dengan pendekatan yang bersifat humanis dan persuasif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rehabilitasi narkotika berfungsi sebagai alat pemulihan yang menggambarkan pendekatan rehabilitatif dan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Kata Kunci: Rehabilitasi, Narkotika, Efek Jera

Ngudi Waluyo University

Legal Studies Program, Faculty of Economics, Law and Humanities

Thesis February 2026

Efka Arviani

111221008

**LEGAL STUDY OF REHABILITATION IN NARCOTICS CRIMES CREATES A
DETERRENT EFFECT**

ABSTRACT

Drug abuse represents a legal concern that includes not just criminal elements but also aspects related to health and society. According to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, individuals who are addicted to drugs and those who are affected by drug abuse must participate in medical and social rehabilitation programs. This study seeks to examine the legal framework surrounding rehabilitation in drug-related offenses, along with how it is executed within rehabilitation centers. The research utilizes an empirical legal approach paired with a socio-legal perspective, bolstered by a review of literature and interviews with representatives from rehabilitation facilities. The results show that, in a normative sense, the framework for narcotics rehabilitation in Indonesia is thoroughly addressed by Law Number 35 of 2009, the Joint Regulation issued by Seven State Institutions in 2014, and is further supported by the principle of individualized sentencing in the new Criminal Code. In terms of execution, rehabilitation is carried out in organized phases, which include evaluation, medical and social treatment, and aftercare initiatives that adopt a kind and persuasive approach. The research suggests that rehabilitation can create a discouraging effect, not by inflicting punishment but by fostering behavioral change, enhancing self-awareness, and aiding social reintegration, which helps prevent repeat offenses. The findings of this study affirm that narcotics rehabilitation acts as a recovery-focused system that also aids in deterrence within Indonesia's rehabilitative and restorative justice structure.

Keywords: Rehabilitation, Narcotics, Deterrent Effect